

Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Dana Desa: Kasus Partisipasi Masyarakat Desa di Kabupaten Luwu Timur

Village Development and Community Welfare Through the Village Fund Policy: A Case of Village Community Participation in East Luwu Regency

Rabina Yunus

Department of Gender and Development, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

E-mail Korespondensi: rabina_yunus@yahoo.com

Diterima: 29 Oktober 2022

Direvisi: 28 November 2022

Disetujui: 30 Desember 2022

DOI: [10.35967/njip.v21i2.359](https://doi.org/10.35967/njip.v21i2.359)

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan partisipatif di lokasi penelitian. penelitian ini berfokus pada belum diketahuinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, serta belum adanya strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkatan partisipasi masyarakat dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa pada wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Keterlibatan masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang setiap program pembangunan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menemukan masalah dan peluang yang ada di masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan akan gagal jika tidak ada partisipasi masyarakat. Dengan cara yang sama, masyarakat harus terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa agar penggunaan dan pengelolaannya lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dana desa masih digunakan dengan buruk dan masyarakat tidak terlibat. Hal ini berdampak pada dukungan masyarakat untuk berbagai inisiatif yang akan dilaksanakan dengan dana desa.

Kata Kunci: Kebijakan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

Abstract: This research was conducted to identify the level of community participation in participatory activities at the research location. This research focuses on the unknown story of community participation in village development in East Luwu Regency, South Sulawesi Province, and the lack of strategies to increase community participation offered. This study aims to identify the level of community participation and formulate strategies to increase community participation in village development activities in the region. Community participation is one of the factors that influence the success of development programs and rural community development. Community participation is needed to realize village development by the needs of the village itself. Community involvement does not only involve the community in the process of making decisions about each development program but also involves the community in identifying problems and opportunities that exist in the community. Every development activity will fail if there is no community participation. In the same way, the community must be involved in the use and management of village funds so that their use and management are more targeted and beneficial to society. In Solo Village, Angkona District, East Luwu Regency, South Sulawesi Province, village funds are still poorly used and the community is not involved. This has an impact on community support for various initiatives that will be implemented with village funds.

Keywords: Village Fund Policy, Community Participation, Village Development

Pendahuluan

Kebijakan dana desa yang digulirkan pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah akan memberikan dana desa sebesar 10% dari APBN pada tahun 2015. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang telah beberapa kali diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan diberikan kepada desa pada tahun 2015. Dana ini disebut Dana Desa (Gohori & van der Merwe, 2022; Subiyakto et al., 2022).

Di Indonesia, Program Inovasi Desa (PID) adalah upaya pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan dana desa dengan membantu desa menjadi lebih baik melalui peningkatan kemampuan mereka untuk membuat rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Program ini berfokus pada tiga sasaran, yaitu pengembangan wirausaha, peningkatan sumber daya manusia, dan pembelian infrastruktur desa (Nurwanda, A., & Badriah, E., 2020; Henriyani, E., 2019). Menurut KepmenDesa PDPT No. 48 Tahun 2018, Program Inovasi Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan dan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan (Nurwanda, A., & Badriah, E., 2020; Henriyani, E., 2019).

Demikian juga subjek pembangunan desa sebagaimana termuat dalam Pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: a) Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. b) Pembangunan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, 2021; Ayu & Nurjaman, 2022; Luhur & Abdillah, 2020; Sudirman & Saidin, 2022).

Ketentuan tersebut di atas, pada intinya, menuntut partisipasi masyarakat untuk menjembatani keduanya. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan (Abdillah, D., et al., 2020; Bednarz et al., 2008; Mayger & Provinzano, 2022). Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan sangat penting karena orang-oranglah yang mengetahui semua seluk beluk masalah yang ada, serta cara untuk mengatasi masalah tersebut (Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, 2021; Bicchieri & Dimant, 2022; Robinson et al., 2022). Salah satu tahap pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan pembangunan (Leicht-Deobald et al., 2022; Luhur & Abdillah, 2020). Pemerintah mengupayakan partisipasi publik dengan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari persentase kehadiran publik dalam pertemuan tersebut, yaitu sekitar 30% -40%. Sekretaris Desa, Tri Banjir Adiwijoyo juga membenarkan hal tersebut dengan pandangan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didorong oleh menjamurnya sikap apatis masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat (Amiruddin et al., 2022; Handayani, 2006; Paraswati et al., 2021).

Jika tingkat partisipasi masyarakat di suatu daerah dianggap lemah, maka tujuan dan manfaat dari kegiatan partisipasi tersebut tidak akan tercapai secara optimal (Baquedano-López et al., 2013; Mansuri, 2004; Sieber, 2006). Tujuan dan keuntungan dari partisipasi masyarakat,

seperti proses belajar masyarakat dan mengarahkan masyarakat ke arah masyarakat yang bertanggung jawab, sangat abstrak. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan keberhasilan pencapaian beberapa tujuan dan keuntungan dari partisipasi masyarakat (Brown & Kyttä, 2014; Forrest & Wiek, 2015; Scardamalia & Bereiter, 1994; Simpson, 2008).

Di lokasi penelitian, masalah berikut dapat ditemukan dari uraian di atas: a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum diketahui secara pasti. Berdasarkan data awal, disebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dikategorikan rendah, bahwa parameter kehadiran masyarakat adalah satu-satunya cara untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. c. Tidak ada pendekatan yang disediakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menentukan seberapa aktif masyarakat di lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Luwu Timur yang belum diketahui.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2016). Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati khususnya proses dalam pelaksanaan kebijakan program dana desa. Jenis pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang dilakukan dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka/dokumentasi, yaitu: a) Wawancara, dengan menanyakan secara langsung dan mendalam (*in depth interview*) kepada informan, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan yang telah ditentukan; dan b) Pengamatan, yaitu kajian yang disengaja dan sistematis dalam mengamati fenomena sosial dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan respons masyarakat terhadap program dana desa. Sumber data sekunder (kajian pustaka dan data diambil dari lembaga bersama) sebagai data primer untuk mendukung data yang diperoleh dari informan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang diukur melalui lima indikator, yaitu inisiatif, pembiayaan, pengambilan keputusan, kemampuan memobilisasi personil, pelaksanaan operasional pembangunan, sedangkan untuk indikator penelitian diambil dari lima jenis kegiatan yang ada di masyarakat yaitu musyawarah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan. Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif. Menurut Miles, Habermas dan Saldana (2018) disebutkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai lengkap, sehingga data jenuh. Kegiatan tersebut terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Desa Solo dipilih karena merupakan miniatur Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, selain itu Desa Solo terletak di ibu kota Kecamatan Angkona. Proses pendataan dilakukan melalui teknik wawancara (wawancara mendalam) dengan menggunakan media rekaman dan buku harian, selain itu peneliti mengikuti musyawarah yang diadakan baik di dusun maupun di Desa Solo. Berbagai data atau fakta yang direkam dan dicatat serta yang diserap oleh ingatan pikiran peneliti kemudian dipindahkan ke dalam suatu tinjauan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan

Untuk memperoleh nilai kebenaran atau keabsahan data serta kredibilitas data, kegiatan yang dilakukan dengan cara: a) Terlibat langsung karena peneliti merupakan instrumen utama, juga memilih responden sesuai dengan teknik yang digunakan; b) Pengumpulan data informan secara detail untuk mempertajam kedalaman dan validitas penelitian atau objektivitas fakta sosial sebagai paradigma etnometodologi. c) Melakukan pemeriksaan anggota, yaitu upaya konfirmasi kembali (berulang) kepada termohon sebagai upaya memperbaiki informan yang diberikan

kesalahan atau menambah informasi; d) Membuat catatan bagi peneliti sebagai alat kontrol dalam mengeksplorasi metode wawancara serta hasil dan kesimpulan yang dibuat; dan e) Triangulasi data yang merupakan panduan praktis untuk melakukan validasi data.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan meliputi informasi dari masyarakat di Desa Solo serta yang terlibat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan jajarannya, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kebijakan Pemerintah tentang bantuan Dana Desa, baik dalam bentuk peraturan maupun ketentuan lainnya mengenai masalah tersebut. Data yang telah dianalisis secara deskriptif perlu dilakukan reduksi data, penyajian data secara sistematis dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami dan dipahami oleh orang lain. Reduksi data dalam analisis kualitatif adalah proses pemilihan data kualitatif, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.

Kesimpulan dan verifikasi adalah bagian analisis penting dan final. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan tiga kondisi yaitu, objektivitas, sistematis dan generalisasi. Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah dilakukan pengumpulan data dengan tahapan akuisisi data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi, apabila kesimpulan masih dirasa kurang maka data diganti kembali. Hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk uraian. Karena itu kekuatan peneliti sangat menentukan keberhasilan penelitian Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam penelitian ini dilakukan deskripsi multidimensi, dialogis dan interpretatif. Model interpretatif didasarkan pada kaidah-kaidah baku, sehingga dicari lebih banyak pemahaman tentang penafsiran sehingga masyarakat dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan partisipatif untuk mencapai pemahaman dasar dan komprehensif. Di samping itu dilakukan wawancara mendalam dan mengamati perilaku masyarakat Desa Solo.

Hasil dan Pembahasan

Peran dan Partisipasi Masyarakat Desa

Indikator empat adalah peran dan partisipasi masyarakat desa: musyawarah, perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pemeliharaan. Terutama partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Konsep yang digunakan menurut Adisasmita, (2006) Keterlibatan dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, disebut partisipasi masyarakat. Selain itu, Adisasmita menyatakan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya masyarakat (SDM) secara lebih aktif dan efisien untuk mencapai hasil pembangunan yang dilakukan di masyarakat rural.

Pengamatan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak program pembangunan yang digagas pemerintah kota gagal melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Akibatnya, ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Ini menghasilkan rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dilihat dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa disadari peran pemerintah masih lebih besar dalam bentuk regulasi yang menghambat kebebasan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat Desa Solo untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, di mana masyarakat belum memahami apa yang harus dilakukan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Sehingga sebagian besar masyarakat memahami bahwa keterlibatan mereka harus diukur dengan uang, karena program Dana Desa merupakan program yang mendapat bantuan keuangan yang sangat besar dari Pemerintah Pusat, sehingga sikap dan perilaku gotong royong sudah mulai pudar.

Menurut Adisasmita (2006) Partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan,

termasuk kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, disebut partisipasi masyarakat. Selain itu, Adisasmita menyatakan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat aktif, atau pemberdayaan masyarakat, adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Jenis pemberdayaan ini berfokus pada pencapaian hasil pembangunan yang dicapai di masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya masyarakat pedesaan (SDM) secara lebih aktif dan efisien dalam hal-hal berikut: a) Aspek input atau input (dana, SDM, peralatan atau fasilitas, data, rencana, dan teknologi); b) Aspek proses (pelaksanaan, pengawasan, dan pengawasan); dan c) Aspek output atau keluar (pencapaian tujuan, efisiensi, dan efektivitas).

Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari keterlibatan anggota masyarakat untuk meningkatkan pembangunan, intinya masyarakat umum atau sebanyak-banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dengan pemerintah untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan, memfasilitasi, mempercepat, dan menjamin keberhasilan upaya pembangunan. Jadi secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai “partisipasi” atau mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Tjokromidjojo (Safi I, 2007: 104) Tiga tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan: a) Berpartisipasi atau terlibat dalam proses penentuan kebijakan, strategi, dan arah pembangunan oleh pemerintah; b) Berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan c) Berpartisipasi dalam pemilihan dan pemanfaatan pembangunan yang adil.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kegiatan integral yang harus dikembangkan, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dari masyarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab.

Indikator yang perlu dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adalah bagaimana mengawasi program infrastruktur yang ada, karena bagian dari pembangunan jalan Tani Desa, Drainase dan dinas jalan serta pasar Desa perlu pengawasan dan pemeliharaan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi para peneliti, bahwa untuk pembangunan Infrastruktur Desa Solo yang telah dilakukan dari anggaran Dana Desa yang diperoleh cukup mendapat respons yang baik dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan bahwa Program prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, bagi Desa Solo terdapat 70% program pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2017, antara lain jalan Desa, Pasar Desa dan pengembangan Kantor Desa dan Drainase, serta pengembangan sumber daya manusia, program yang dilaksanakan adalah bimbingan pembuatan keterampilan sahutun kelapa untuk dijadikan oleh-oleh sekaligus keterampilan kerajinan bagi kelompok pemberdayaan ibu-ibu desa.

Sebagaimana diusulkan oleh Aliasar (1992) indikator-indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program: a) penurunan jumlah orang yang termasuk dalam kategori miskin; b) pengembangan upaya untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; c) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; dan d) peningkatan jumlah orang yang tinggal di lingkungan mereka.

Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan di atas, jika dikaitkan dengan masyarakat di Desa Solo masih dikategorikan sebagai kelompok tipologi desa berkembang. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat sumber daya yang dimiliki masyarakat yang masih rendah, apalagi jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan, Desa Solo masyarakatnya kurang lebih 65% yang belum pernah bersekolah secara formal (lulus SD), 25% sudah bersekolah di SMP dan 10% bergelar sarjana.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dan dari data yang diperoleh baik dari informan maupun responden dipandang perlu untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa

Solo, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan ekonominya dengan lebih baik, sehingga program yang diusulkan akan lebih banyak dilaksanakan pada pembangunan sosial dengan pertimbangan khusus Program infrastruktur memiliki beberapa usulan program yang telah dilaksanakan melalui anggaran Dana Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun kekuatan pada manusia dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi mereka dan berusaha untuk berkembang (Sabri, 2021). Dalam kamus bahasa Indonesia, kata "kekuatan" didefinisikan sebagai (1) cakap, kuat; (2) memiliki pemahaman tentang cara mengatasi masalah, dan sebagainya. Istilah "komunitas" sering digunakan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hubungan negara. Namun, para ahli berbagi pendapat tentang istilah komunitas (Lizzo & Liechty, 2022; Sabri, 2021; Southwick et al., 2014).

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan memberi mereka inspirasi, motivasi, dan kesadaran akan potensi mereka dan keinginan untuk berkembang (Sabri, 2021). Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang peduli sebagai pihak yang memberdayakan dalam (Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, 2021; Abdillah & Ahmadi, 2022; Luhur & Abdillah, 2020; Prastio et al., 2021; Sabri, 2021) menegaskan bahwa hal itu erat kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi daerah yang pada gilirannya dapat menciptakan dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Peran serta masyarakat Desa Solo untuk berpartisipasi apabila proposal program yang akan dilaksanakan berada di lokasinya.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Solo, peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, yaitu: a) Faktor internal: usia, tingkat pendidikan, dan jumlah pengeluaran adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Karakteristik individu termasuk usia, tingkat pendidikan, pengeluaran keluarga, total pendapatan, dan pengalaman kelompok; b) Faktor eksternal, termasuk hubungan yang ada antara manajer proyek dan target, yang dapat mempengaruhi partisipasi karena target akan terlibat secara sukarela dalam proyek jika respons manajer positif dan menguntungkan mereka, dan jika mereka didukung dengan layanan manajemen kegiatan yang positif dan tepat yang dibutuhkan oleh target.

Hasil penelitian yang menunjukkan respons responden terhadap karakteristik program pelaksana program dari usulan program penggunaan Dana Desa ada 12 orang (13,34%) menyatakan sangat baik, 38 orang (42,23%) menyatakan baik, dan 40 orang (44,45%), menyatakan tidak baik. Data ini menunjukkan singkong dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin selaku sekretaris dusun Sidodadi.

Selain itu, ada juga faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial (sumber daya manusia). Faktor-faktor ini termasuk tantangan yang berasal dari kepribadian individu, salah satunya adalah ketergantungan, yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang melakukan pengamatan langsung di desa Solo, bahwa yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi adalah gender. Laki-laki lebih banyak terlibat di desa daripada perempuan, masalahnya karena bagi perempuan desa mereka

cenderung mengurus rumah tangga sampai selesai.

Hasil wawancara dengan kepala dusun RT 2 Sidodadi menunjukkan bahwa ibu-ibu sulit terlibat dalam meningkatkan pembangunan, terutama dalam kebijakan Dana Desa. Ini terutama berlaku bagi ibu-ibu di pedesaan karena peran mereka masih di dalam rumah, berbeda dengan ibu-ibu di ibu kota kecamatan atau kabupaten karena mereka tahu peran mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Kelompok ini telah diberi pengetahuan dan instruksi tentang keterampilan perempuan serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

Hasil penelitian keterlibatan perempuan dalam program kebijakan Dana Desa menunjukkan bahwa 24 (26,67%) orang menyatakan bahwa perempuan terlibat, 63 (70%) memilih perempuan untuk mengurus rumah tangganya, dan 3 (3,33%) tidak memahami. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan di pedesaan memang minim, sehingga partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Begitu juga dengan usia, usia orang dengan usia paruh baya ke atas cenderung berpartisipasi lebih banyak daripada kelompok usia lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, faktor pendidikan juga dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi, dengan pertimbangan bahwa tingkat pendidikan sangat mendukung masyarakat untuk berpartisipasi karena dapat memahami apa yang akan dilaksanakan dan menjadi kebutuhan masyarakat di dusun tersebut. Selain hal di atas, pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong partisipasi, dalam hal ini partisipasi tidak hanya berarti partisipasi untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan secara fisik, tetapi partisipasi masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai pembangunan bantuan material, atau dalam bentuk dana.

Hasil penelitian pelibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Solo diperoleh 20 (22,23%) jiwa yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja, 33 (36,67%) dalam bentuk bahan bangunan, 37 (41,12%) dalam bentuk makanan dan minuman. Bentuk partisipasi ini merupakan bagian dari keterlibatan sebagian masyarakat di Desa Solo. Indikator partisipasi lainnya adalah lama tinggal dan lamanya waktu seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga kepemilikan terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan perwujudan kemandirian desa, sehingga tingkat partisipasi masyarakat di desa berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan desa (Abdillah, Deliarnoor, et al., 2020; Amiruddin et al., 2022; Luhur & Abdillah, 2020; Prastio et al., 2021), organisasi masyarakat desa, dan kelembagaan tradisional, serta kesatuan ekonomi dan lingkungan, karena pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui upaya pembangunan mandiri dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pelibatan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan Program Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan (*Pembangunan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat*)

Diharapkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan dapat membantu mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota (Teo, 2022; Zhou et al., 2022). Pembangunan yang dituntut berarti pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagai objek pembangunan. Agar pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat, setiap elemen masyarakat harus terlibat.

Dalam proses pembangunan di Desa Solo, tahapan perencanaan sering kali tumpang tindih, sehingga pertemuan dengan warga dapat terjadi secara bersamaan selama beberapa tahap, seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta topik diskusi yang tidak

teratur, yang menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi yang tepat, keunikan ini tentunya dapat mengurangi efektivitas pertemuan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Sari menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pemerintahan desa adalah faktor lain yang menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena mereka merasa tidak terlibat. Pemerintah Desa Solo membagi tanggung jawab untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. Salah satu indikator yang perlu dianalisis lebih dalam adalah perilaku pelaksana program mengenai sikap, di mana persepsi, tanggapan dan tindakan merupakan kesiapan mental bagi pelaksana program Dana Desa. Perilaku individu berasal dari dorongan yang ada pada manusia, sedangkan dorongan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada manusia.

Pada prinsipnya, persepsi, tanggapan dan tindakan yang diambil dalam pelaksanaan program telah dilakukan, namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat kurangnya respons terhadap berbagai keluhan dari masyarakat, sehingga reformasi dari segala aspek melalui tindakan sadar sebagai bentuk tanggung jawab bahwa: sebagai kecenderungan pelaksanaan tanggung jawab kebijakan yang meliputi kesadaran, arah dan intensitas kebijakan publik menjadi penting (Chalhoub, 2018; Rahman et al., 2020; Sururi, 2020).

Peran penting penerapan sikap dalam implementasi dalam suatu kebijakan (Boyland et al., 2017; Pradana et al., 2020), yaitu: apabila pelaksana memperhatikan suatu kebijakan tertentu, maka dimungkinkan pelaksana untuk melakukan sebagaimana dimaksud oleh pengambil keputusan. Tetapi ketika sikap atau perspektif pelaksana berbeda dengan pengambil keputusan, proses penerapan kebijakan menjadi pasti lebih sulit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan tersebut, maka akan berujung pada tidak melakukannya.

Terkait dengan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, salah satu faktor yang menghambat masyarakat adalah kurangnya transparansi pelaksana Dana Desa, selain kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa dan aparaturnya, sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap program apa yang direncanakan. Oleh karena itu perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa.

Dukungan/Partisipasi Masyarakat

Pembangunan Nasional dan pembangunan desa pada umumnya bergantung pada pemerintah dan aparaturnya, tetapi juga partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ini terutama berlaku dalam pelaksanaan kebijakan program Dana Desa. Partisipasi publik penting untuk pembangunan, dan bahkan menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.

Level keterlibatan anggota masyarakat Desa Solo pada tahap perencanaan adalah tingkat partisipasi mereka dalam pertemuan untuk merumuskan kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa. Tingkat partisipasi ini dinilai berdasarkan tingkat perencanaan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi motivasi bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang telah ditentukan.

Keputusan tentang perencanaan pembangunan harus diambil dari prioritas terpenting yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, yang tentunya berasal dari berbagai usulan yang telah diajukan oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan utama yang menurut masyarakat paling mendesak harus dipercepat dengan mempertimbangkan anggaran yang telah diberikan oleh Dana Desa. Rencana program pembangunan ini harus berasal dari usulan seluruh masyarakat—dan bukan hanya pemangku kepentingan—dan kemudian dilanjutkan dengan keputusan perencanaan

yang paling penting.

Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih bahagia dan dihargai jika mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat karena mereka terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, karena masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka menjadi apatis tentang apa yang harus dilakukan.

Hasil wawancara dengan ketua Bada Permusyawaratan Desa Solo (BPD) menunjukkan bahwa masyarakat belum terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana program pengembangan dana desa. Akibatnya, ukuran kinerja pemerintah desa Solo tidak memenuhi aspirasi masyarakat sepenuhnya.

Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Supervisi)

Untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, pengawasan adalah serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan. Mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan dan menemukan masalah adalah bagian dari pengawasan. Semua pihak yang terlibat dalam program harus memantau aktivitasnya dan memastikan bahwa tujuan program telah tercapai dengan tepat sasaran dan sesuai jadwal. Pemerintah desa, dengan bantuan masyarakat, menjalankan program, tetapi pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab secara khusus untuk mengelola Dana Desa.

Pengawasan perlu dilakukan, karena hal ini menyangkut dana desa yang harus dipertanggungjawabkan, permasalahan yang terjadi di banyak desa di mana penggunaan Dana Desa ditemukan dalam banyak kasus penyelewengan Dana Desa, beberapa di antaranya ditemukan untuk memperkaya yang bersangkutan, bahkan ada yang hanya melakukan sebagian kecil program pembangunan dan sisanya Dana Desa digunakan untuk berbagi antar pengelola program dan bahkan tidak di sesuai dengan program yang telah diusulkan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat program Dana Desa dijalankan. Pertama, hasil akhir dari pembangunan adalah masyarakat diharapkan menerima hasil pembangunan seolah-olah itu milik mereka sendiri, sehingga masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk kemajuan bersama. Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari pembangunan, yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung karena mereka telah diberikan oleh pemerintah. Dengan cara ini, masyarakat dapat memanfaatkan air bersih dengan mudah dan dapat mengakses jalan taman, dan karena renovasi pipa, masyarakat dapat mendapatkan air bersih kembali dari air pegunungan. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat yang mengatur dan mengamankan setiap program yang telah dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan hasil pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan seberapa banyak hasil pembangunan yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan desa digunakan, baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat Desa Solo melihat manfaat dari pembangunan infrastruktur, yaitu jalan yang menghubungkan dusun lain. Pasar Desa dan jalan raya yang melintasi hamparan sawah Selain itu, ada juga gedung yang berfungsi untuk desa, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat desa Solo biasanya aktif mengawasi, seperti menjadi budaya baru di Indonesia di mana masyarakat lebih aktif memberikan kritik atau masukan kepada pemerintah daripada melakukan pekerjaan fisik di lapangan. Masyarakat desa biasanya mengawasi kinerja pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan bersama.

Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan

Tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi hasil pembangunan ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat berpartisipasi dalam menilai keberhasilan hasil pembangunan yang diperoleh

dari bantuan dana Desa yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Transmigrasi setiap tahun. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, agar desa dapat lebih maju dan berkembang dalam meningkatkan pembangunan khususnya di Desa Solo bantuan pendanaan telah diperoleh sejak tahun 2015 hingga saat ini.

Penilaian hasil pembangunan bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan yang dicapai dan apakah telah dilaksanakan berdasarkan usulan dan program yang dilakukan oleh masyarakat Desa Solo dapat tercapai, dalam hal ini pembangunan desa. Begitu juga pada tahap pengawasan, begitu juga dengan apa yang terjadi pada tahap evaluasi, tampaknya tidak dapat dipungkiri bahwa budaya memberikan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan ke dalam budaya masyarakat Indonesia (Abdillah et al., 2021; Abdillah & Ahmadi, 2022; Amiruddin et al., 2022).

Begitu juga dengan budaya gotong royong yang ada di masyarakat Desa Solo, di mana setiap kegiatan program yang telah dan akan dilaksanakan mendapat berbagai respons dari masyarakat, partisipasi dalam berpartisipasi mulai terkikis dengan berbagai respons yang disampaikan kepada pelaksana program, sehingga ungkapan sekretaris Desa dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh tim peneliti menyatakan bahwa menjadi masyarakat yang baik warga, memberikan yang terbaik kepada Desa tercinta karena masyarakat juga telah memperoleh dan menikmati hasil pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Bahwa proses pelaksanaan dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Solo telah terimplementasi dengan baik, namun tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan belum sepenuhnya terlibat karena berbagai kendala, bahkan partisipasi masyarakat lebih cenderung didominasi oleh laki-laki daripada perempuan/Ibu; b) Pada tahap pelaksanaan program Dana Desa di 5 (lima) dusun di Desa Solo pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan, karena menyangkut kekurangan anggaran, sehingga tingkat partisipasi tidak hanya berdasarkan Dana Desa itu sendiri, tetapi masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam swadaya yang baik dalam bentuk material (pasir, batu dan konsumsi makanan dan minuman) dari warga; c) Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan, masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan usulan program di tingkat musyawarah dusun, sehingga sebagian masyarakat menjadi apatis karena keterlibatannya dibatasi oleh pemerintah desa selaku pengambil kebijakan; d) Tingkat partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian dengan studi kasus Desa Solo menunjukkan bahwa faktor tingkat kemauan dan kemampuan serta faktor peluang yang diberikan oleh pemerintah desa sebagai pengelola program kegiatan tidak berjalan optimal, membuat masyarakat apatis dan berbagai alasan yang dikemukakan; dan e) Pelaksanaan usulan program telah dilaksanakan dengan baik, di mana pada tingkat dusun diadakan rapat tingkat desa, namun pada Musrenbang Rapat Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) desa yang diusulkan tidak dilaksanakan sesuai dengan program yang diusulkan, karena pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pengelola program Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Desa (BPD) pemerintah beserta aparaturnya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A., Prastio, L. O., & Effendi, S. N. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia. *Jurnal Identitas*, 1(2), 48–61. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>
- Abdillah, A., & Ahmadi, Z. (2022). Tata Kelola Berkelanjutan: Studi Tentang Idealitas Model Tata Kelola Daerah Sulawesi Selatan, Indonesia. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(1), 44–69. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i1.8433>
- Abdillah, A., Deliarnoor, N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati, F. (2020). The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 67–81. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11>
- Abdillah, A., Oka Prastio, L., & Nur Effendi, S. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia. *Jurnal Identitas*, 1(2), 48–61. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>
- Abdillah, D., N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati. (2020). The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 67–81. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11>
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.
- Aliasar, A. (1992). *Tolok Ukur Keberhasilan Suatu Program*. IKIP PADANG.
- Amiruddin, I., Hartaman, N., & Abdillah, A. (2022). RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID19 DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 200. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7314>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>
- Baquedano-López, P., Alexander, R. A., & Hernandez, S. J. (2013). Equity Issues in Parental and Community Involvement in Schools. *Review of Research in Education*, 37(1), 149–182. <https://doi.org/10.3102/0091732X12459718>
- Bednarz, S. W., Chalkley, B., Fletcher, S., Hay, I., Heron, E. Le, Mohan, A., & Trafford, J. (2008). Community Engagement for Student Learning in Geography. *Journal of Geography in Higher Education*, 32(1), 87–100. <https://doi.org/10.1080/03098260701731553>
- Bicchieri, C., & Dimant, E. (2022). Nudging with care: the risks and benefits of social information. *Public Choice*, 191(3–4), 443–464. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00684-6>
- Boyland, M., Nugroho, A., & Thomalla, F. (2017). The Role of the Panglima Laot Customary Institution in the 2004 Indian Ocean Tsunami Recovery in Aceh. In *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Progress, Challenges, and Issues* (pp. 357–376). Springer International Publishing AG.
- Brown, G., & Kytta, M. (2014). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004>
- Cahyadi Kurniawan, R., Maulida, K., & Hertanto, H. (2021). Networking Institutionalism oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam Mengoptimalkan Kebijakan Gender. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 46–57. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.158>
- Chalhoub, M. S. (2018). Public policy and technology choices for municipal solid waste management a recent case in Lebanon. *Cogent Environmental Science*.

- <https://doi.org/10.1080/23311843.2018.1529853>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Forrest, N., & Wiek, A. (2015). Success factors and strategies for sustainability transitions of small-scale communities – Evidence from a cross-case analysis. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 17, 22–40. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.05.005>
- Gohori, O., & van der Merwe, P. (2022). Tourism and Community Empowerment: The Perspectives of Local People in Manicaland Province, Zimbabwe. *Tourism Planning & Development*, 19(2), 81–99. <https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1873838>
- Handayani, S. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Kompik Solo.
- Henriyani, E. (2019). Program inovasi desa; antara peluang dan tantangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 66-70.
- Leicht-Deobald, U., Busch, T., Schank, C., Weibel, A., Schafheitle, S., Wildhaber, I., & Kasper, G. (2022). The Challenges of Algorithm-Based HR Decision-Making for Personal Integrity. In *Business and the Ethical Implications of Technology* (pp. 71–86). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18794-0_5
- Lizzo, R., & Liechty, T. (2022). The Hogwarts Running Club and Sense of Community: A Netnography of a Virtual Community. *Leisure Sciences*, 44(7), 959–976. <https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1755751>
- Luhur, A., & Abdillah, A. (2020). Dekolonisasi dan Indegenisasi Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(2), 164–186. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.86>
- Mansuri, G. (2004). Community-Based and -Driven Development: A Critical Review. *The World Bank Research Observer*, 19(1), 1–39. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkh012>
- Mayger, L., & Provinzano, K. (2022). Leadership for Family and Community Engagement: A Qualitative Policy Analysis of State Principal Evaluation Processes. *Educational Administration Quarterly*, 58(1), 141–177. <https://doi.org/10.1177/0013161X211052501>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. age publications.
- Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 68-75.
- Paraswati, R., Merthawan, G., & Yasini, K. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT HINDU TERHADAP TERHADAP NGABEN MASSAL. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 12(3), 177–187. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v12i3.336>
- Pradana, A. E., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2020). Public-Private Partnership in the Framework of Waste Management into Electrical Energy in Jatibarang Landfill, Semarang City. *Journal of Local ...* <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/11809>
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.261>
- Rahman, A., Myrna, R., & Karlina, N. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management by The Environmental Office of Bekasi Regency. *Jurnal Administrasi Publik: Public ...* <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/3601>
- Rani, F., Ismandianto, I., & Kirana, K. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan*, 20(2), 14–25. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>
- Robinson, A., Sile, L., Govind, T., Guraya, H. K., O'Brien, N., Harris, V., Pilkington, G., Todd, A., & Husband, A. (2022). 'He or she maybe doesn't know there is such a thing as a review': A qualitative investigation exploring barriers and facilitators to accessing medication reviews from the perspective of people from ethnic minority communities. *Health Expectations*, 25(4), 1432–1443. <https://doi.org/10.1111/hex.13482>
- Sabri, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Ekonomi Lingkungan* (Joniswan, pp. 33–60). Media Sains Indonesia.
- Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer Support for Knowledge-Building Communities. *Journal of the Learning Sciences*, 3(3), 265–283. https://doi.org/10.1207/s15327809jls0303_3
- Sieber, R. (2006). Public Participation Geographic Information Systems: A Literature Review and Framework. *Annals of the Association of American Geographers*, 96(3), 491–507. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2006.00702.x>
- Simpson, M. C. (2008). Community Benefit Tourism Initiatives—A conceptual oxymoron? *Tourism Management*, 29(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.005>
- Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1). <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338>
- Subiyakto, B., Jumriani, J., Abbas, E. W., Muhaimin, M., & Rusmaniah, R. (2022). Community Economic Empowerment Through The Existence of Thematic Village. *The Innovation of Social Studies Journal*, 4(1), 01. <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.6368>
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44–58. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269>
- Sururi, A. (2020). Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon. *Aristo*, 8(1), 129. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2266>
- Teo, S. S. (2022). Shared projects and symbiotic collaborations: Shenzhen and London in comparative conversation. *Urban Studies*, 59(8), 1694–1714. <https://doi.org/10.1177/00420980211048675>
- Zhou, Y., Chen, T., Feng, Z., & Wu, K. (2022). Identifying the contradiction between the cultivated land fragmentation and the construction land expansion from the perspective of urban-rural differences. *Ecological Informatics*, 71, 101826. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101826>